

EFEKTIFITAS KEBIJAKAN SEKURITISASI JEPANG UNTUK MENGATASI ISU PENURUNAN ANGKA KELAHIRAN TAHUN 2005-2022

Anmita Intan Fatimah

Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UPN “Veteran” Yogyakarta
anmitaintanf@gmail.com

Nabila Kirana Pramadevi

Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UPN “Veteran” Yogyakarta
nabilakpramadevi@gmail.com

Apriyanti Eka Handayani

Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UPN “Veteran” Yogyakarta
apriyantiekaahd@gmail.com

Dyah Puspa Maharani

Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UPN “Veteran” Yogyakarta
maharani.dyahp21@gmail.com

Submitted: January 28th 2024 | Accepted: January 31st 2024

ABSTRAK

Sebagai salah satu faktor krusial keberlangsungan dan kesinambungan negara, angka kelahiran di suatu negara merupakan agenda rutin yang akan terus dikaji para pembuat kebijakan. Sebagai negara yang secara masif dan berkelanjutan mengalami penurunan angka kelahiran, pemerintah Jepang secara berkala menetapkan berbagai kebijakan guna menekan penurunan angka kelahiran masyarakatnya. Upaya ini merupakan langkah sekuritisasi pemerintah untuk mengatasi ancaman ketidakamanan negara dari segi ancaman kepunahan populasi masyarakat Jepang. Sekuritisasi merupakan upaya aktor negara dalam menjadikan suatu isu politis sebagai permasalahan keamanan untuk dapat melakukan langkah-langkah tertentu demi mengatasi ketidakamanan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektifitas dari upaya sekuritisasi Jepang dalam meningkatkan angka kelahiran di Jepang. Penelitian akan dikaji dan difokuskan pada evaluasi kebijakan publik dengan indikator kenaikan ataupun penurunan angka kelahiran. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif, penulis mengambil data dari internet yang menjadi sumber informasi utama dari website Pemerintah Jepang beserta sumber jurnal atau berita lainnya. Lalu, data tersebut akan dianalisis dengan deskripsikan sebaik mungkin

untuk mengaitkan data dengan kerangka berfikir yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang ditetapkan Jepang masih belum efektif karena pemerintah cenderung lebih fokus dalam penanganan masalah yang timbul di permukaan, ketimbang meninjau dan mengupayakan perubahan sistem yang ada di masyarakat.

Kata kunci: angka kelahiran, Jepang, kebijakan, sekuritisasi, masyarakat

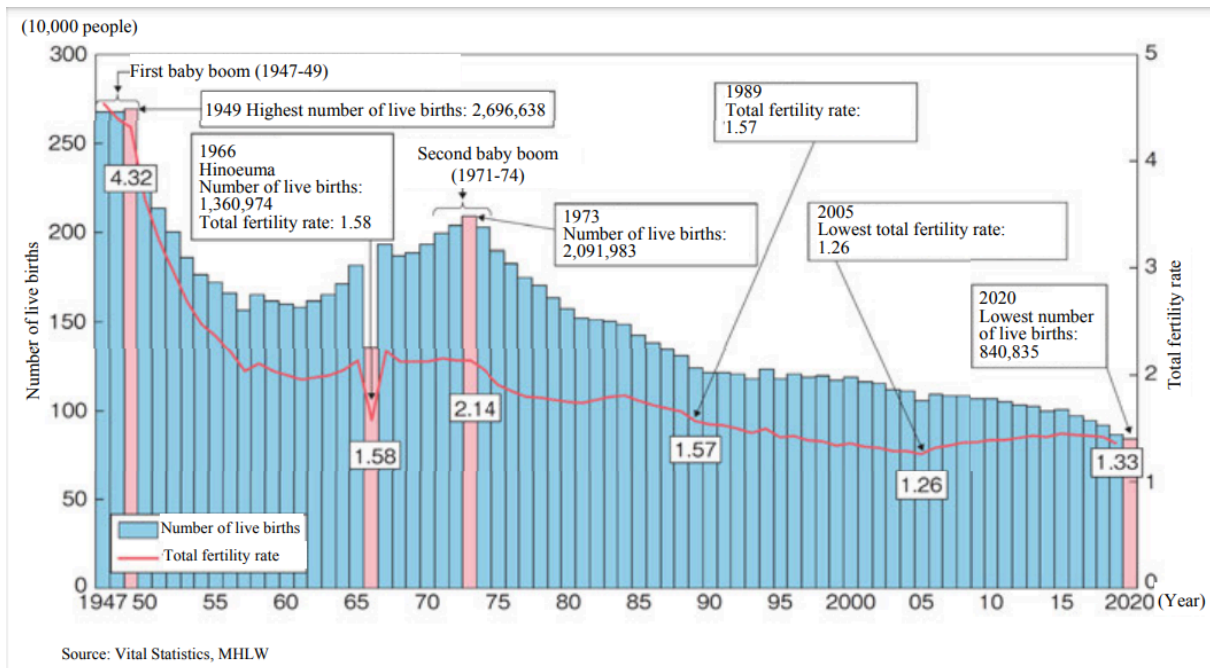
ABSTRACT

The emerge of declining birth rate issue in Japan has already been a custom agenda to solve as the matter is one of the most significant factors to determine nation's sustainability. The efforts by Japan's government are a means of securitization to overcome the threat of nation's insecurity from Japan's population extinction. Securitization is the process of state actors transforming a certain political issue into a matter of security to perform any attempt to conquer the insecurity issue. This research aimed to study the effectiveness of Japan government securitization means in the attempt to increase citizen's birth rate. The research is investigated and focused on public policy evaluation utilizing the increase and decrease birth rate as indicator. The authors employ a qualitative descriptive research method, extracting data from the internet, mainly from the Japanese government's official websites, as well as journals and other news sources, to further been associated to the utilized framework. The research found that Japan's policy is not yet sufficient to tackle the issue since the country seems to be too occupied to overcome economic issues which rather categorized as the surface problem rather than determining the social structure problem around its citizens.

Keywords: birth rate, citizen, Japan, policy, security

PENDAHULUAN

Permasalahan penurunan angka kelahiran di Jepang telah menjadi isu yang muncul sejak lama, dimulai tahun 1965 pada masa pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe. Saat itu Jepang memiliki angka kelahiran yang anjlok sangat rendah, sehingga dibuatlah kebijakan untuk menaikkan angka kelahirannya. Ternyata seiring berjalannya waktu hingga abad 21 ini Jepang masih memiliki angka kelahiran yang rendah. Isu ini tentunya dirasakan banyak masyarakat Jepang dan tentunya pemerintahannya. Warga Jepang dengan usia lanjut usia semakin banyak yang ditunjukkan dengan angka harapan hidup Jepang mencapai 84,6 tahun tertinggi di dunia, sedangkan orang dengan usia muda semakin berkurang ditambah angka kelahiran yang sangat rendah (WorldData.info, 2023). Data menunjukkan jumlah penduduk usia 65 tahun keatas berjumlah 29,1% dari keseluruhan warga pada Oktober 2022 (Nippon.com, 2022). Jumlah tersebut merupakan angka yang tertinggi dibandingkan negara-negara lain di dunia. Para ahli, pengamat dan pemerintah Jepang yang tentunya memperhatikan keberlangsungan negaranya merasakan kekhawatiran bahwa tidak akan ada banyak penerus bangsa di tahun-tahun selanjutnya. Hal itu dikarenakan, orang yang berusia produktif pada masa sekarang akan semakin tua dan tidak akan produktif lagi, sedangkan mereka tidak memiliki keturunan untuk melanjutkan kehidupan dan kepemimpinan di negara Jepang sendiri.



White Paper Japan Cabinet Office

Berdasarkan data diatas, pemerintah Jepang secara berkala melakukan pencatatan dan pengadministrasian tentang jumlah penduduk, usia masyarakat, angka kelahiran, dan lain-lain. Berdasarkan data tersebut, pada tahun 1950 angka melahirkan merupakan angka tertinggi dalam sejarah yaitu sebesar 4.32, lalu seiring berjalannya waktu angka itu terus mengalami penurunan. Penurunan drastis yang pertama pada tahun 1965 sebesar 1.58. Walau beberapa tahun selanjutnya mengalami kenaikan, namun angka yang muncul tetap turun di tahun-tahun selanjutnya. Hal itu ditunjukkan data pada tahun 1989 ada 1.57, tahun 2005 ada 1.26, hingga tahun 2020 ada 1.33. Pada tahun 1950 angka melahirkan dari perempuan merupakan angka tertinggi dalam sejarah yaitu diatas 100%, lalu seiring berjalannya waktu angka itu terus mengalami penurunan. Hal itu ditunjukkan data pada tahun 2000 ada 41,3%, tahun 2005 ada 38,8, tahun 2010 ada 40,4% terus menurun sampai tahun 2015 ada 39%, tahun 2016 ada 38,6%, tahun 2017 ada 37,9%, 2018 ada 39,7%, tahun 2018 ada 37,3%, tahun 2019 ada 35,7%, tahun 2020 ada 35.0%. Selanjutnya, pada tahun 2021 perempuan Jepang yang berusia 15-49 tahun secara keseluruhan hanya 34.4% saja yang melahirkan anak (National Institute of Population and Society Research, 2023). Angka tersebut secara tidak langsung menunjukkan turunnya minat perempuan untuk melahirkan anak.

Sebagai contoh negara-negara lain di dunia sangat memerhatikan angka kelahiran karena hal ini akan menentukan masyarakat usia produktif. Negara lain seperti China malah membuat kebijakan untuk mengurangi angka kelahiran karena ditakutkan akan menambah beban dan jumlah orang yang akan menjadi pengangguran di masa depan. Hal itu bisa menjadi kekhawatiran sendiri bagi negara yang belum bisa menjamin masa depan negaranya akan menjadi baik kedepan. Fakta tersebut adalah kebalikan apa yang terjadi di Jepang, sebagai salah satu negara maju, Jepang memiliki perekonomian yang sangat besar. Jepang memerlukan orang-orang yang berusia

produktif lebih banyak karena perekonomian terus berkembang. Hal tersebut memang terjadi, data orang-orang yang tidak menikah antara umur 25-29 tahun sebesar 71,4% laki-laki dan 59,0% perempuan pada tahun 2006. Sedangkan rata-rata perempuan melahirkan pertama kali berada di umur 29 tahun berdasarkan tahun 2006 (Cabinet Office, 2008). Namun, angka itu jika terus bertahan, justru akan membawa kehancuran kedepan karena tidak ada penerus bangsa yang ada. Sehingga, jika Jepang mampu meningkatkan angka kelahiran warganya, maka Jepang dapat terus menjadi negara yang maju dan semakin maju.

Jepang mengalami kenaikan angka dari jumlah masyarakatnya yang belum menikah seumur hidup. Angka meningkat dengan cepat, hal tersebut terlihat pada tahun 1980 masih berkisar di 2,60% oleh laki-laki dan 4,45% oleh perempuan, namun pada tahun 2010 naik menjadi 20,14% oleh laki-laki dan 10,61% oleh wanita. Survei dari 'Riset Dasar Persalinan ke-14 dan Survei Nasional Tren Pernikahan dan Kelahiran'(Survei Lajang) yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Kependudukan dan Jaminan Sosial Nasional (2011) menunjukkan angka yang jelas pada peningkatan tersebut. Angka minat pada pernikahan turun dari tahun 1987 sejumlah 91,8 turun menjadi 86,3%, sedangkan angka tidak berniat menikah naik pada tahun 1987 dari 4,5% menjadi 9,4% pada tahun 2010 (Office, 2013a).

Analisis melakukan penelitian terhadap responden dari Jepang. Analisisnya menyebutkan permasalahan yang dihadapi Jepang dalam menerapkan kebijakan yang menyenggal permasalahan lain yang ada di negaranya. Jepang memikirkan segera cara untuk menambah jumlah penduduk mereka hingga menyinggung tentang imigrasi. Di sisi lain, Jepang ingin menambah populasi, tapi penduduk Jepang yang di luar negeri juga sangat sedikit, sekitar 3%. Di Jepang, faktanya adalah banyak penduduknya yang tidak murni dari Jepang, yaitu menikah dengan keturunan bukan Jepang. Ia memprediksikan bahwa populasi Jepang bisa menurun hingga 50% dari populasinya sekarang pada tahun 2050 (Menju, 2017)..

Jepang memiliki masyarakat yang sangat rendah minatnya untuk melahirkan. Data lain menunjukkan 49,4% dari 400 responden yang berusia 18-29 tahun tidak tertarik untuk memiliki anak karena memiliki kendala finansial dalam menjamin keberlangsungan hidup mereka serta beban moral untuk melahirkan dan mengasuh anak. Survei ini dilakukan oleh Rohto Pharmaceutical yang kemudian juga menemukan bahwa 53% pria dan 45,6% wanita tidak tertarik untuk menjadi orang tua dengan alasan yang sama. Di Jepang, 27% wanita yang lahir pada tahun 1970 belum pernah melahirkan anak pada saat mereka berusia 50 tahun, menurut statistik dari Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Angka ini merupakan yang terbesar di antara 17 negara dengan data yang sebanding, dan yang paling mendekati adalah Finlandia sebesar 20,7%. Austria dan Spanyol masing-masing berada di peringkat ketiga dan keempat. Data OECD tidak mencakup Jerman, tetapi statistik resmi negara tersebut menunjukkan bahwa 21% wanita yang lahir pada tahun 1969 tidak memiliki anak.

Terdapat 24 negara dengan data yang sebanding untuk wanita yang lahir pada tahun 1965. Di antara kelompok tersebut, Jepang sekali lagi memimpin dalam hal jumlah perempuan yang tidak memiliki anak, yaitu 22,1%. Negara-negara Eropa Barat telah berhasil menahan lonjakan individu tanpa anak dengan menawarkan bantuan untuk menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga. Menurut beberapa

laporan, jumlah perempuan tanpa anak telah menurun drastis di Amerika Serikat dan Inggris.



Grafik di atas merupakan survei juga dilakukan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) bahwa wanita yang sudah berumur 50 tahun (kelahiran sekitar 1960-1970) yang tidak memiliki anak tertinggi dipegang oleh Jepang. Jepang memiliki jumlah wanita berusia 50 tahun yang tidak memiliki anak tertinggi di antara negara-negara maju, data terbaru menunjukkan, menggarisbawahi tantangan yang dihadapi negara ini dalam mencegah krisis populasi yang membayangi.

Permasalahan terkait penurunan angka kelahiran dan pernikahan di Jepang merupakan keadaan tidak ideal yang diakui Perdana Menteri Fumio Kishida sebagai penghambat negaranya dalam menjaga kesinambungan fungsi sosial. Di Jepang sendiri, isu ini menjadi agenda krusial dalam pembuatan kebijakan di negara tersebut. Tercatat Jepang secara berkala telah membuat berbagai kebijakan guna meningkatkan angka kelahiran dengan memberikan bantuan dana bantuan dan Kesehatan dan lain sebagainya demi mengatasi isu tersebut. Melihat data penurunan angka kelahiran di Jepang yang cukup kritis serta penggalakkan upaya pemerintah yang cukup massif terkait peningkatan angka kelahiran, dapat dikatakan bahwa negara ini tengah melakukan upaya sekuritisasi demi menjaga keberlangsungan populasi negaranya. Isu yang cukup signifikan ini ditambah dengan respon aktif pemerintah kemudian akan menarik untuk dibahas kaitannya untuk meninjau dan mengukur bagaimana efektifitas dari upaya pemerintah dalam langkah sekuritisasinya menghadapi angka penurunan populasi dan kelahiran di negara tersebut.

Penulis melihat isu ini sebagai isu yang sangat menarik dibahas dan diuraikan lebih lanjut. Pada pembahasan selanjutnya, penulis ingin menjelaskan secara komprehensif dimulai dari tindakan-tindakan aktor atau orang-orang Jepang yang membuat isu ini menjadi besar, sehingga dikeluarkannya kebijakan pemerintah dan gerakan/tindakan untuk menangani masalah tersebut dengan menggunakan teori tersekuritisasi. Setelah itu, penulis juga akan mengevaluasi kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah tersebut. Sehingga, penulis akan berfokus pada apakah upaya-upaya kebijakan yang dilakukan pemerintah Jepang dalam menangani isu penurunan kelahiran di Jepang sudah efektif diterapkan atau tidak.

KERANGKA BERPIKIR

Teori Sekuritisasi

Sekuritisasi menurut Barry Buzan menggabungkan pemikiran dengan metode teoritis (menjelaskan sesuai dengan dasar teori, tetapi belum terbukti kebenarannya) serta empiris (sebuah pengetahuan yang didapatkan dari hasil observasi atau uji lapangan langsung, atau benar-benar terjadi). Pendekatan ini melibatkan pertanyaan mengapa sekuritisasi terjadi; bagaimana penentuan sekuritisasi maupun desekuritisasi; bagaimana proses sekuritisasi maupun desekuritisasi; serta meneliti bagaimana sekuritisasi juga desekuritisasi dieksekusikan.

Dalam buku *Security: A New Framework for Analysis*, Buzan dkk. (1998: 32) menjelaskan bahwa teori sekuritisasi menganalisis pemahaman tentang tujuan pelaksanaan sekuritisasi: siapa yang menetapkan kebijakan sekuritisasi tersebut, ancaman pada masalah atau isu apa sekuritisasi dilaksanakan, untuk melindungi siapa pelaksanaan sekuritisasi tersebut, mengapa melakukan sekuritisasi, hasil apa yang ingin dicapai dari pelaksanaan sekuritisasi, serta dalam pengaruh apa pelaksanaan sekuritisasi akan berhasil. Secara garis besar, analisis sekuritisasi melibatkan tiga poin utama untuk diulas, yaitu: objek rujukan aktor sekuritisasi, dan aktor fungsional.

Menurut Teori Sekuritisasi, sekuritisasi terjadi ketika adanya perubahan dari yang awalnya suatu isu/masalah dianggap sebagai masalah biasa, kemudian dianggap menjadi ancaman yang mengancam keamanan negara. Hal ini dipertimbangkan berdasarkan proses subjektif aktor sekuritisasi yang mempertimbangkan bahwasanya isu/masalah tersebut dapat mengancam aspek sosial atau politik negara tersebut.

Menetapkan kebijakan bahwa sebuah isu/masalah menjadi masalah keamanan nasional yang disekuritisasikan menimbulkan sebuah kebijakan yang diiringi dengan proses dan tahapan dalam menangani isu tersebut. Aktor sekuritisasi membuat kebijakan dan tahapan dalam rangka mengatasi isu tersebut untuk mengurangi ancaman terhadap negaranya dengan menggunakan 'label' ancaman sebuah isu yang akan disekuritisasikan. Sekuritisasi sebuah isu melalui penerapan label hanya dilakukan oleh aktor politik, yang memutuskan apakah sesuatu harus diperlakukan sebagai ancaman eksistensial. Di sisi lain, para analisa meneliti tindakan aktor politik dan memilah-milah apakah tindakan mereka memenuhi persyaratan sekuritisasi. Analis juga menilai dampak dari sekuritisasi terhadap unit analisis lainnya.

Upaya sekuritisasi yang berhasil membutuhkan elemen-elemen berikut: mengikuti proses penyajian isu sebagai ancaman eksistensial terhadap objek referen melalui tindak tutur; aktor sekuritisasi memiliki posisi otoritas untuk melakukan upaya tersebut; audiens tindak tutur keamanan menerima klaim aktor; dan ada ancaman eksistensial yang mengharuskan dilakukannya sekuritisasi. Dengan demikian, sebuah ancaman dianggap telah disekuritisasi hanya jika ancaman tersebut diakui sebagai masalah keamanan dalam dunia akademis dan wacana pembuatan kebijakan yang lebih luas. Dalam istilah yang lebih konkrit, sebuah negara, dengan mengidentifikasi perkembangan tertentu sebagai isu keamanan, dapat mengklaim hak khusus untuk mengerahkan upaya maksimal untuk mengatasi masalah tersebut secara efektif. Ketika suatu masalah disekuritisasi, maka akan mengarah pada cara-cara tertentu untuk mengatasinya: Ancaman, pertahanan, dan seringkali solusi yang berpusat pada negara. Solusi-solusi ini meliputi alokasi sumber daya, keterlibatan militer dan legislasi.

Proses sekuritisasi menggunakan unit analisis objek rujukan, aktor pelaksana sekuritisasi, dan aktor fungsional. Objek rujukan merupakan suatu hal yang menjadi ancaman dan harus dipertahankan kelangsungan hidupnya. Dalam konteks keamanan tradisional, negara merupakan objek rujukan keamanan yang paling utama. Kelangsungan hidup sebuah negara berkaitan erat mengenai pertahanan dan keamanan seputar kedaulatan negara itu sendiri. Buzzan dkk (1998) tidak menggambarkan keamanan hanya seputar negara saja, tetapi mereka juga menggambarkan keamanan sebagai sebuah objek vital yang harus dijaga kelangsungan hidupnya. Selain objek rujukan keamanan, ada pula aktor yang menjadi pencetus kebijakan sekuritisasi. Aktor tersebut memberlakukan sekuritisasi terhadap suatu objek rujukan keamanan dengan alasan ancaman yang disebabkan oleh suatu isu tertentu. Umumnya, aktor sekuritisasi dapat berupa pemimpin politik, birokrat, pemerintahan, dan lainnya. Selain aktor sekuritisasi, ada juga aktor fungsional yang juga menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan di bidang keamanan.

Copenhagen School mengidentifikasi sekuritisasi menjadi tujuh langkah area, yakni isu, aktor sekuritisasi, konsep keamanan, proses sekuritisasi, tingkat sekuritisasi, dampak sekuritisasi terhadap ancaman, serta kondisi yang mempengaruhi sekuritisasi. Dalam mengkaji sekuritisasi, isu berkaitan langsung dengan aktor sekuritisasi karena isu yang menjadi faktor utama pemberlakukan sekuritisasi oleh para aktor sekuritisasi, apakah isu tersebut perlu ditangani oleh aktor negara sehingga perlu dijadikan isu keamanan nasional atau tidak. Sebagai tambahan, aktor sekuritisasi tersebut dapat berupa pemerintah, masyarakat sipil, atau yang lainnya.

Penerapan sekuritisasi juga harus mempertimbangkan konsep keamanan, siapa yang menjadi objek rujukan sekuritisasi atas sebuah isu tertentu oleh aktor sekuritisasi. Dalam pelaksanaan sekuritisasi, proses sekuritisasi menilai tentang efektivitas aktor sekuritisasi, apakah objek rujukan sudah terlindungi dari isu keamanan nasional atau belum. Hasil sekuritisasi dibagi menjadi tiga, yakni evaluasi keberhasilan atau kegagalan penerapan tingkat sekuritisasi, serta faktor yang mempengaruhi implementasi sekuritisasi.

Teori Evaluasi Kebijakan Publik

Teori Evaluasi Kebijakan Publik. Evaluasi kebijakan publik, yang juga disebut sebagai evaluasi sumatif, adalah sebuah proses akhir dalam pembentukan kebijakan publik yang digunakan untuk menilai hasil akhir dari implementasi kebijakan publik tersebut. Kriteria evaluasi kebijakan publik mencakup efektivitas implementasi kebijakan tersebut, efisiensi jalannya kebijakan tersebut, keadilan bagi yang terdampak akibat kebijakan tersebut, serta kecukupan cakupan penerapan kebijakan. Selain itu, evaluasi kebijakan publik juga mencakup proses pelaksanaan kebijakan publik yang menilai partisipasi masyarakat, akuntabilitas/pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kebijakan tersebut, serta transparansi laporan data dan fakta lapangan.

Menurut Rian Nugroho (2017), Teknik evaluasi kebijakan dapat dinilai dari membandingkan implementasi kebijakan dengan proses dan hasil yang sama di tempat yang berbeda; mengevaluasi hasil kebijakan berdasarkan rentang waktu atau periode tertentu; evaluasi eksperimental dengan mengintervensi pelaksanaan kebijakan dengan simulasi atau variabel baru yang diterapkan di tengah implementasi kebijakan tersebut; evaluasi *ad hoc* yang didapat dari suatu hasil implementasi kebijakan yang

didapatkan tetapi tidak sesuai rancangan awal penyusunan kebijakan; dan membandingkan hasil kebijakan dengan kebijakan lain yang sudah terlaksana.

Ciri-ciri evaluasi kebijakan publik termasuk menemukan hal-hal strategis untuk meningkatkan kinerja kebijakan; evaluator kebijakan yang tidak mempunyai hubungan dan mengambil jarak dari pembuat, pelaksana, dan target kebijakan; mengevaluasi kebijakan menggunakan metodologi yang jelas; tidak melakukan evaluasi dengan perasaan pribadi, seperti permusuhan dan kebencian; serta evaluasi kebijakan mencakup rumusan, implementasi, lingkungan, dan kinerja kebijakan (Nugroho, 2017). Dapat disimpulkan bahwa ciri evaluasi kebijakan mencakup evaluasi dari kebijakan itu sendiri. Rossi dan Friedman (1985) memberikan delapan pertanyaan yang harus terjawab dalam hasil evaluasi kebijakan, namun yang kami gunakan dalam penelitian kami hanya berfokus pada hasil atau angka kelahiran di Jepang setiap tahunnya setelah kebijakan-kebijakan pemerintah diterapkan.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang ingin diteliti, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami teori, sudut pandang, maupun pola perilaku individu atau kelompok tertentu dalam mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena yang terjadi dengan mengandalkan data sekunder. Metode kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang digunakan untuk menguji argumen atau teori-teori tertentu dengan cara menguji hubungan antar variabel yang telah ditemukan (Nugrahani, 2014). Penelitian ini digunakan untuk menganalisis sebuah fenomena, kejadian, atau keadaan sosial, dimana akan menampilkan hasil data apa adanya tanpa proses manipulasi yang nantinya menghasilkan data deskriptif berbentuk teks maupun lisan dalam analisis subjek penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui studi literatur, dengan fokus pada pengumpulan informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan topik penelitian. Proses pengumpulan data melalui studi literatur dalam penelitian ini dilakukan secara komprehensif melalui internet dan sumber *website* resmi pemerintah Jepang yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis.

Proses analisis data dilakukan dalam bentuk deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan secara mendalam proses terjadinya suatu peristiwa berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan secara sistematis. Data yang telah terkumpul disusun dan dianalisis dengan menggunakan kerangka pemikiran yang telah disiapkan sebelumnya, sehingga penarikan kesimpulan nantinya akan lebih akurat dan relevan terhadap fenomena yang diteliti.

PEMBAHASAN

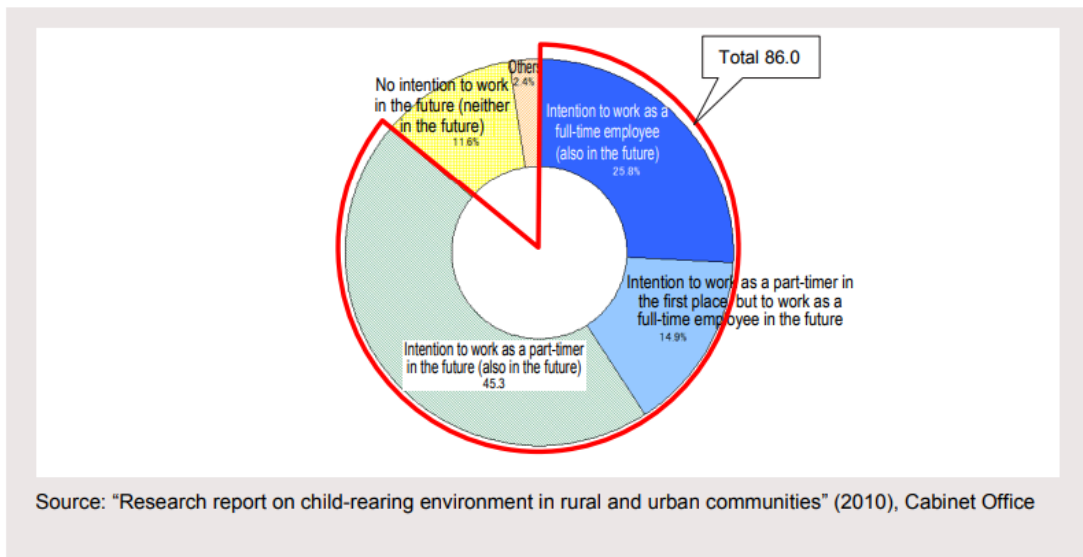
Kecenderungan warga Jepang melakukan tren untuk tidak menikah dan tidak memiliki anak

Perilaku masyarakat Jepang melakukan tren tidak ingin menikah atau memiliki anak dirasakan hampir oleh semua orang di seluruh negeri. Isu ini merupakan fakta yang umum diketahui seluruh masyarakat Jepang. Namun, hanya sedikit orang saja yang mau merubah pemikiran tersebut dan sadar akan kebutuhan melahirkan anak.

Sebelum berlanjut ke analisis pembahasan isu lebih lanjut, penulis akan membahas mengenai fenomena, tren atau kebiasaan yang menjadi alasan/penyebab yang memicu masyarakat Jepang melakukan hal tersebut.

Survei pada tahun 2011 dilakukan oleh Institut Kependudukan dan Sosial Nasional Riset Keamanan mengenai Survei Tren Kelahiran ke-14 (Survei Pasangan Menikah) menunjukkan alasan-alasan para pasangan tidak ingin memiliki anak. Hasil survei tertinggi berjumlah 60,4% beralasan bahwa membutuhkan biaya yang tinggi untuk merawat anak dan biaya pendidikan anak. Posisi kedua sejumlah 35,1% beralasan bahwa tidak ingin memiliki anak di usia yang dianggap sudah tua. Posisi ketiga sejumlah 19,3% mengatakan bahwa mereka tidak memiliki anak walaupun sudah berusaha. Selanjutnya ada 18,6% dengan alasan demi kesehatan, 17,4% mengatakan tidak sanggup menanggung beban lanjut baik secara psikologis maupun fisik, 16,8% mengatakan terganggu akan pekerjaan mereka (dunia kerja dan keluarga). Alasan-alasan lain adalah karena mereka memiliki tempat yang sempit, suami tidak mendukung istrinya dalam urusan rumah tangga dan membesarkan anak, mengharapkan anak tertua menjadi dewasa sebelum suami pensiun, karena suami tidak menginginkan anak, lingkungan tidak memadai bagi anak untuk tumbuh dan berkembang tanpa hambatan, dan yang terakhir adalah karena ingin memiliki kehidupan pribadi dan pernikahannya. Survei tersebut dilakukan kepada orang berusia kurang dari 30 hingga 49 tahun (Office, 2013a). Survei tersebut menunjukkan secara garis besar bahwa memiliki anak dipandang bukan menjadi sesuatu yang penting di dalam kehidupan masyarakat Jepang dikarenakan lingkungan masyarakat sosial dan lingkungan kerja yang sangat kompetitif.

Fig. 1-1-12 Intentions of wives to get to work



White Paper Japan Cabinet Office

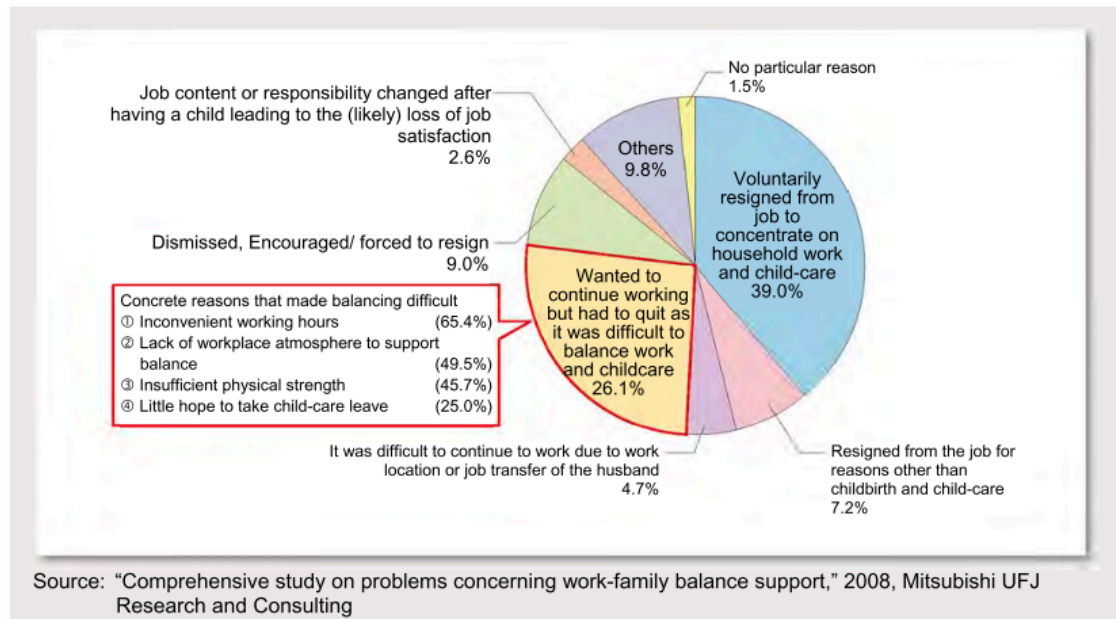
Berdasarkan data tersebut menunjukkan secara jelas minat terbesar perempuan Jepang hanya ingin fokus untuk kesejahteraan dirinya sendiri untuk bekerja dan

mendapatkan uang. Perempuan Jepang memiliki pandangan bahwa melahirkan anak merupakan hal yang merepotkan dan hanya membuat mereka rugi akan banyak hal yang mencakup uang dan waktu. Hal itu terjadi karena pandangan tidak adanya kesetaraan gender, laki-laki dipandang tidak perlu bertanggung jawab dalam mengurus anak. Zaman sekarang merupakan zaman dengan perubahan yang sangat cepat. Bahkan, negara China yang telah memiliki kebijakan satu anak setiap pasangan karena jumlah penduduk yang besar serta angka kelahiran yang tinggi, akhir-akhir ini juga mengalami penurunan angka kelahiran yang cukup signifikan. Pola kehidupan dimana semua orang akan bersaing untuk bekerja di tempat yang bagus dan mendapatkan status yang lebih tinggi dengan meningkatkan perekonomian mereka. Para perempuan akan lebih memilih untuk mempertahankan pekerjaannya yang tanpa henti daripada mengurus anak. Para perempuan Jepang lebih memilih bekerja dan mendapatkan kepuasan untuk bersenang-senang dengan teman dan keluarga yang dimiliki sekarang. Hal itu tidak dapat terus dilakukan jika mereka memiliki tanggungan untuk mengurus anak (Littlejohn, 2023). Gaya kerja dan daya saing/kompetisi masyarakat Jepang sangat tinggi, memang hal inilah yang membawa Jepang menjadi negara dengan perekonomian tinggi di dunia dengan segala pencapaian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi. Namun, hal itu malah membuat para pekerja perempuan ikut berkompetisi dengan hanya fokus bekerja dan tidak mau melahirkan anak.

Warga Jepang tidak melihat fakta mengenai keluarga dan anak adalah suatu hal yang perlu diperhatikan dengan sangat baik dan bukan menjadi salah satu konsentrasi utama setelah mereka dewasa. Berdasarkan data tahun 2009 menyebutkan bahwa partisipasi ayah dalam mengurus anak hanya sebesar 59,2%, peningkatan usaha dalam merealisasikan antara hidup dan kerja hanya 54,8%, usaha untuk meningkatkan sistem kehamilan dan suport untuk kelahiran anak serta dalam segala alat kesehatan 52,9%, usaha untuk promosi kehidupan seseorang setelah mengandung dan melahirkan 50,4%. Angka tersebut berasal dari pertanyaan survei dari jawaban peduli, memiliki pikiran yang sama, tidak setuju, biasa saja, tidak setuju atau tidak menjawab (Office, 2010).

Keseimbangan dalam kehidupan yang tidak ada. Warga Jepang merasa keseimbangan kehidupan antara kerja dan mengurus rumah tidak dapat dilakukan atau susah di terapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Fig. 1-1-18 Reasons for resigning before or after pregnancy/childbirth



White Paper Japan Cabinet Office

Tabel diatas menunjukkan tindakan yang dilakukan perempuan Jepang ketika sebelum atau sesudah mengandung dan melahirkan. Survei paling banyak sejumlah 39.0% mengatakan memang secara sukarela mengundurkan diri dari pekerjaannya. Namun, hasil di peringkat kedua sejumlah 26,1% menunjukkan perempuan Jepang yang sebenarnya ingin melanjutkan kerja namun harus berhenti karena merasa akan kesusahan ketika mengatur keseimbangan kerja dan mengurus anak. Peringkat tiga terdapat 9,0% dipaksa mengundurkan diri. Peringkat keempat dengan alasan-alasan lain. Peringkat kelima sebanyak 7,2% mengundurkan diri dari pekerjaan diluar alasan melahirkan dan mengurus anak. Peringkat keenam sebanyak 4,7% mengatakan sulit untuk melanjutkan kerja karena lokasi kerja atau pekerjaan suami yang diganti. Peringkat ketujuh sebanyak 2,6% menunjukkan pekerjaan yang berubah setelah perempuan melahirkan dan memiliki anak. Lalu yang terakhir tidak memiliki alasan tertentu (Office, 2016a). Survei di atas menunjukkan permasalahan yang terjadi masih dirasakan perempuan secara individu atas ketakutan dan kenyataan yang masih sangat susah mendukung keberlanjutan kehidupan ketika ingin melahirkan dan membesarkan anak. Maka tidak heran jika perempuan Jepang membayangkan masa depan mereka menjadi seperti itu, sehingga takut untuk mengambil keputusan dengan melahirkan dan memiliki anak.

Kebijakan sekuritisasi Jepang dalam meningkatkan angka kelahiran

Para ahli, pengamat, dan pemerintah Jepang mulai menunjukkan kekhawatiran mengenai fenomena ketidak inginan masyarakat Jepang untuk menikah dan memiliki anak. Hal ini sesuai dengan tahapan sekuritisasi yaitu perhatian para aktor masyarakat dimana isu ketidak inginan menikah dan memiliki anak oleh masyarakat Jepang menjadi perhatian lebih dengan sebuah tindakan oleh berbagai masyarakat, kalangan, ahli maupun pemerintah. Mereka menunjukkan aksinya

untuk membicarakan isu ini menjadi sebuah perhatian yang harus segera disadari oleh orang lain secara luas. Hal itu ditunjukkan oleh beberapa tindakan tokoh-tokoh publik yang akan dijabarkan di bawah ini.

Kekhawatiran mengenai isu yang telah banyak menyebar dan menjadi masalah Jepang itu diungkapkan oleh politikus senior Toshihiro Nikai, ia mengungkapkan bahwa tidak menikah adalah suatu tindakan yang egois. Beliau mengatakan bahwa orang muda zaman sekarang tidak mau direpotkan dengan mengurus anak. Padahal jika dibandingkan dengan masa perang dengan kelaparan tidak ada yang mengatakan bahwa memiliki anak adalah sesuatu yang sangat merepotkan. Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh ahli demografi yang menyebutkan populasi Jepang akan menurun drastis pada masa mendatang. Ia yang berasal dari politisi konservatif sangat mendesak masyarakat untuk mempunyai anak lebih banyak sehingga dapat membentuk keluarga yang besar. Lalu dari parlemen majelis, Kanji Kato mengungkapkan apabila para perempuan yang ingin terus melajang hanya akan menjadi beban keluarga pada masa mendatang. Ada lagi Koichi Hagiuda seorang pejabat eksekutif berkata bahwa tugas perempuan itu adalah mengasuh anak, apabila mengasuh diberikan kepada laki-laki akan menimbulkan permasalahan lain terhadap perkembangan anak (McCurry & Nikai, 2018). Berbagai pendapat diatas dilontarkan tidak lain adalah sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan hidup bagi generasi mendatang.

Senior ekonom dari Japan Research Institute Ltd., Takumi Fujinami mengatakan bahwa survei kepada perempuan di Jepang menunjukkan data yang sangat mengejutkan. Banyak wanita Jepang sangat tidak berminat menikah dan memiliki anak karena adanya kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan. Keinginan perempuan untuk tidak menikah dan memiliki anak sudah ada sejak awal. Beliau menganggap bahwa kebijakan tradisional pemerintah Jepang untuk menurunkan angka kelahiran misalnya mendorong pernikahan atau penambahan fasilitas untuk keperluan anak bukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah. Dari hasil survei tersebut, ia menyarankan dengan hasil survei seperti itu seharusnya dapat didapatkan solusi baru dari sudut pandang baru dalam bidang pangan dan gaji akibat kesenjangan gender bagi kaum muda (HISANAGA, 2023). Permasalahan dirasakan oleh berbagai ahli di berbagai macam bidang. Hal itu terjadi karena masing-masing bidang masyarakat saling berhubungan satu sama lain. Apabila terdapat kehidupan sosial yang tidak seimbang akan mengakibatkan permasalahan di bidang ekonomi dan lainnya pula. Maka disini, para pengamat atau ahli akan mengungkapkan kekhawatirannya terhadap permasalahan besar yang mungkin akan dialaminya.

Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida mengatakan keprihatinannya terhadap fenomena turunnya angka kelahiran di Jepang pada awal tahun 2023. Ia meragukan kelangsungan masyarakat Jepang karena berkurangnya angka usia produktif di masa depan. Lalu, ia menambahkan tentang perlunya perhatian dan kebijakan tentang perawatan anak-anak tidak boleh dihiraukan dan perlu tindakan yang sungguh-sungguh tanpa menunda-nunda dengan serius. Selanjutnya, beliau juga menekankan bahwa pemerintah Jepang perlu mengeluarkan anggaran dua kali lebih banyak lagi untuk program-program peningkatan angka kelahiran. Sebelumnya, kebijakan serta upaya-upaya telah dilakukan, namun hasilnya hampir

tidak merubah apapun (George Wright, 2023). Bahkan, seorang pemimpin negara akan merasa paling bertanggung jawab untuk segera menangani permasalahan di negaranya. Namun isu ini adalah isu yang dialami satu negara sehingga perlu kesepakatan atas rapat pemerintahan yang resmi.

Pemerintah Jepang sepakat untuk membuat beberapa aturan yang akan diterapkan di negaranya. Hal itu didasari oleh kekhawatiran-kekhawatiran para ahli bahkan dari Perdana Menteri Jepang sendiri. Dengan demikian, apabila dari pertimbangan ahli serta konsentrasi masyarakat yang besar pula, maka isu penurunan angka kelahiran yang terus menerus perlu dibuat regulasi yang disepakati bersama atas nama undang-undang yang dikeluarkan oleh negara. Maka itulah yang dinamakan suatu isu mengalami sekuritisasi.

Pemerintah Jepang tegas mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengurangi angka penurunan kelahiran di Jepang. Hal ini merupakan tindakan final dalam teori sekuritisasi dimana suatu isu telah menjadi tersekuritisasi karena suatu isu dapat disadari dan ditentukan cara-cara untuk menangani isu tersebut dengan adanya kebijakan yang mengikat seluruh masyarakat Jepang. Kebijakan tersebut sudah mulai digalakkan pada tahun 2008, walau tahun-tahun sebelumnya sudah mulai coba diterapkan. Seperti data yang disebutkan sebelumnya, terdapat penurunan angka minat melahirkan dari perempuan Jepang, yaitu pada tahun 2000 berjumlah 41.3% dan turun lebih parah lagi pada tahun 2005 dengan angka yang paling rendah dalam sejarah hingga sekarang yaitu sejumlah 38,8%. Pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan untuk menangani situasi yang semakin buruk tersebut.

Jepang pernah melakukan usaha peningkatan angka kelahiran ketika terjadi penurunan yang sangat turun drastis pada tahun 1980 sejumlah 1,57. Lalu Pemerintah Jepang langsung mengeluarkan kebijakan yang disebut “Angel Plan” pada tahun 1994 dengan gambaran kebijakannya adalah merawat keseimbangan antara kerja dan mengurus anak dengan tujuannya membangun lingkungan yang mudah untuk membesarkan anak yang ditunjukan pada pembangunan infrastruktur untuk mendukung segala program di atas. Kebijakan ini akan melibatkan pekerja, ibu, kesehatan anak, konsultasi dan edukasi. Kebijakan ini direvisi pada tahun 1999 dengan nama baru “New Angel Plan” dan terus dirancang untuk digunakan dari tahun 2000 hingga tahun 2004 (Office, 2008). Namun, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Jepang tersebut, seolah-olah tidak memberikan pengaruh apa-apa. Bahkan, yang terjadi adalah jumlah angka kelahiran yang muncul terus menurun di tahun 1990 an hingga tahun 2005.

Berdasarkan beberapa laporan yang penulis dapat dari internet, Jepang telah melakukan rincian program-program dengan pengeluaran biaya secara detail per tahunnya. Kebijakan tersebut diketahui mulai diperketat lagi pada tahun 2006, 2007, 2008 dan 2009 dengan rincian umum program; untuk meningkatkan kepercayaan pribadi serta kekuatan kekuatan anak, meninjau gaya kerja untuk mendukung keseimbangan antara kehidupan kerja dan keluarga, memahami hal yang penting dari bekerja dan keluarga, dukungan baru dan kesatuan untuk meningkatkan anak-anak. Hal ini tidak heran dilakukan oleh pemerintah Jepang karena pada tahun 2005 negaranya mengalami penurunan angka kelahiran terendah yang pernah ada yaitu sebesar 1,26% (melihat tabel yang ada di

pendahuluan). Tindakan tersebut tidak lain adalah perilaku dari adanya sekuritisasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Jepang. Padahal sudah ada kebijakan untuk meningkatkan angka kelahiran anak pada tahun 1994 dan 1999, namun dari hasil angka kelahiran malah menunjukkan penurunan yang sangat buruk pada tahun 2005. Seolah-olah kebijakan yang diterapkan tidak menunjukkan hasil apa-apa, malah membuat keadaan semakin parah.

Upaya sekuritisasi diambil oleh Pemerintah Jepang dengan mulai rutin menganggarkan secara khusus keuangan negaranya untuk meningkatkan angka kelahiran. Kurikulum sekolah di Jepang disesuaikan untuk meningkatkan kekuatan hidup anak-anak, untuk TK, SD dan SMP direvisi bulan Maret 2008 sedangkan untuk SMA direvisi pada bulan yang sama tahun 2009 dan benar-benar diterapkan sepenuhnya pada April tahun 2011. Usaha tersebut tercatat dalam laporan implementasi pada tahun 2010 tentang implementasi dasar untuk anak-anak. Pemerintah memberikan tunjangan anak sebelum lulus SMP per bulan sebesar 13000 yen sekitar 1,3 juta rupiah. Kebijakan tentang peningkatan beasiswa Badan Administrasi Layanan Mahasiswa Jepang dengan alokasi anggaran yang terus ditingkatkan dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2010 terdapat peningkatan 35.000 dari tahun sebelumnya.

Upaya menangani pekerjaan swadaya dengan penuh semangat, suport pekerja untuk pemuda, mengembangkan sistem pegawai dengan berbagai macam jenjang karir dengan berbagai macam cara; mempromosikan skill pegawai muda, pengembangan pusat pelayanan terpadu bagi remaja (disebut kafe kerja), promosi untuk dukungan dan pengembangan bagi anak-anak dan orang muda. Program peningkatan pentingnya keseimbangan hidup dalam keluarga yang dirinci dalam beberapa tindakan; pencerahan dan pelatihan peran kehamilan dalam rumah tangga dan keluarga, program pertemuan murid dengan muka bayi dengan fasilitas rumah perawatan dan pusat kesehatan, pengenalan program sekolah, keluarga, rumah, pengenalan hari keluarga, minggu keluarga, investigasi dan riset dalam formasi keluarga. Program-program tambahan tentang kemanusiaan yang kaya melalui pembelajaran dan pengalaman (Office, 2011).

Pemerintah juga berupaya meningkatkan kesadaran pentingnya dukungan keluarga di berbagai aspek lingkungan masyarakat. Pemerintah menganggarkan untuk bantuan persalinan, pengembangan sistem perawatan perinatal, mengamankan transportasi medis perinatal, pusat konseling kelahiran, penambahan fasilitas yang akan menunjang pertumbuhan dan kesehatan anak, mendukung secara khusus terhadap anak yang disabilitas (Office, 2011). Selanjutnya, pengembangan lebih detail dilakukan di tahun-tahun setelahnya. Hal itu dilakukan tidak lain karena laporan angka kelahiran di Jepang menunjukkan kenaikan yang masih sangat sedikit yaitu 1,395 (tahun 2011) menjadi 1,381 (tahun 2012) (Prospects, 2024). Pembentukan Hello Baby Project, yaitu proyek kunjungan kepada rumah-rumah untuk melakukan konsultasi, bimbingan, saran untuk mengasuh bayi. Implementasi proyek penitipan anak di taman kanak-kanak. Pemanfaatan ruang kosong di mall, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan taman kanak-kanak sebagai tempat yang berfungsi untuk mensupport keberadaan anak-anak. Kebijakan yang mensupport anak-anak di perusahaan yang menerapkan sistem pinjaman untuk rumah dan

mempromosikan rumah asuh anak dengan kualitas tinggi. Pembangunan gedung-gedung, sistem transportasi, perumahan dan semuanya yang berhubungan untuk kehidupan pengasuhan anak agar lebih nyaman (Office, 2012). Program-program tersebut terus berlanjut dilaksanakan pada tahun 2013 pula (Office, 2013).

Pemerintah mengeluarkan rancangan undang-undang pada sidang bulan Maret tahun 2012 (sesi-180) yang terkait dengan anak-anak dan pengasuhan anak diatas dengan bentuk Sistem Dukungan yang komprehensif yang mendukung RUU yang disebut dengan “New System” dengan sumber dana yang berasal dari sistem asuransi dan sistem pajak. Alur kebijakan ini akan dilaksanakan pada tahun 2015 (Office & Plan, 2014). Undang-undang lainnya juga dibentuk meliputi kebijakan yang mendukung tumbuh kembang anak dan pendidikan anak. Hal itu dilakukan tidak lain adalah untuk menciptakan kemudahan bagi setiap keluarga yang memiliki anak.

Tahun 2015 angka kelahiran masih sama seperti tahun 2012 yaitu 1,395. Pada tahun 2013 menunjukkan angka 1,409 dan 1,401 pada tahun 2015) (Prospects, 2024). Pemerintah Jepang tidak putus asa untuk membuat aturan dan pengetatan pada sistem pendukung untuk anak dan tumbuh kembang anak yang telah direncanakan pada tahun 2013 yang benar-benar mulai diterapkan pada April 2015. Undang-undang itu mencakup instalasi administrasi anak dan pengasuhan anak. Menteri Negara Misi Khusus ditunjuk secara khusus untuk menjadi penanggung jawab atas organisasi baru yaitu Administrasi Anak dan Dukungan Anak. Lalu upaya melibatkan seluruh warga untuk mewujudkan “Tiga Pilar Baru Stabilitas (Abenomics)” dilaksanakan pada Oktober 2015. Lalu terdapat sidang nasional pada bulan November untuk mewujudkan keterlibatan masyarakat yang dinamis untuk menumbuhkan siklus yang semakin positif di dalam negara untuk meraih target kenaikan angka kelahiran menjadi 1,8.

Tahun 2016 pemerintah Jepang melakukan amandemen kepada aturan terhadap anak dan aksi dukungan terhadap urusan anak-anak. Amandemen dilakukan sejak April 2016 setelah mengidentifikasi hal-hal mendesak pada sidang yang dilakukan November 2015. Kebijakan ini diatur pada Diet yang diwujudkan dalam proyek-proyek untuk menolong dan mendukung anak-anak bagi pemilik perusahaan dan fasilitas kesehatan (Office, 2016). Kontribusi dianjurkan kepada seluruh pekerja perusahaan di Jepang. Usaha besar-besaran dan melibatkan seluruh masyarakat Jepang diberlakukan pada tahun ini dengan nama program “Rencana Jepang untuk Keterlibatan Dinamis Seluruh Warga Negara” pada Juni 2016.

Tahun 2017 “New System” masih berlanjut dari tahun 2015 dan diperbarui dengan nama “Project Plan” untuk mendukung anak dan membesarkan anak berdasarkan tempat penitipan anak di masing-masing daerah. Kapasitas penitipan anak di masing-masing kota diperluas lagi. Fasilitas penitipan anak diberlakukan di tempat kerja dari orang tua atau tempat pemberi kerja. Pemerintah Jepang menaikkan gaji pengasuh anak bagi semuanya dengan kenaikan sebesar 2% pada anggaran tahun 2017. Upaya pemerintah Jepang untuk menciptakan lingkungan yang suportif terhadap anak tidak berhenti sampai situ saja. Pemerintah memudahkan pencarian pekerja pengasuh anak dengan menghubungkan antara

keluarga yang membutuhkan pelayanan dengan orang-orang pencari kerja termasuk mahasiswa yang ingin magang di fasilitas penitipan anak. Pada tahun 2017 pemerintah menambah layanan pemeriksaan kesehatan serta fasilitas dukungan kepada ibu dan anak tahap awal setelah kelahiran. Tambahan anggaran pemerintah juga diberikan kepada keluarga yang memiliki tanggungan beberapa anak dengan pendapatan rumah tangga pada jumlah tertentu (Office, 2017). Hal itu ditujukan supaya orang tua yang mengalami perubahan gaji dapat menyesuaikan kebutuhannya melalui kebijakan ini supaya dapat mengurus rumah tangga serta anaknya dengan sebaik-baiknya. Hal itu dilakukan pemerintah untuk membuat kenyamanan seluruh warga sebagai bentuk perhatian untuk mendukung penyelesaian masalah.

Pada Juli 2018 Jepang membuat Konsorsium Dukungan Pengasuhan Anak yang dipimpin oleh Mitsuhiro Miyakoshi selaku Menteri Negara Urusan Penurunan Angka Kelahiran. Kegiatan ini menggabungkan organisasi-organisasi bisnis yang ada di Jepang. Hal itu ditujukan untuk membentuk suasana pendidikan nasional yang ramah terhadap anak dan mendukung pada kelahiran anak. Pada Oktober tahun 2018 terdapat proyek bernama "Proyek Sankyū Papa". Proyek ini adalah promosi terhadap suami pada kelahiran anaknya serta ketika anaknya masuk rumah sakit. Pada tahun 2019 dialokasikan pajak dari reformasi pajak tahun fiskal yang diberlakukan pada 31 Maret 2021. Pemerintah memberikan otoritas publik regional untuk mendukung pernikahan dan pengasuhan anak di rumah menggunakan AI (Cabinet Office, 2019).

Penanganan penurunan angka kelahiran mulai diperinci di pemerintah daerah. Faktor-faktor, data jumlah warga, angka kesuburan dan lain-lain di berbagai kota menjadi bahan untuk analisis faktor penurunan angka kelahiran beserta penanganan yang dapat diberlakukan. Salah satu contoh kota yang memberlakukan kebijakan tersebut adalah Shizuoka, Okayama, Nagasaki dan Hiroshima. Program bantuan diberikan kepada pasangan yang baru menikah untuk biaya hidup awal pernikahan keduanya. Markas Besar Sekretariat Kabinet menanggulangi penurunan angka kelahiran dengan pendekatan regional dengan fokus pada kebutuhan lokasi dan kondisi masyarakat regional. Pada dasarnya terdapat beberapa tindakan yang dilakukan pemerintah Jepang yang merupakan turunan atau program keberlanjutan pada tahun-tahun sebelumnya. Program-program itu dikembangkan kembali menyesuaikan perkembangan kehidupan yang ada; peningkatan secara lebih luas mengenai penitipan anak, membuat lingkungan untuk mewujudkan harapan perkawinan semakin tinggi serta kelahiran yang mudah, menciptakan lingkungan yang memudahkan hingga 3 anak, reformasi gaya kerja bagi laki-laki dan perempuan, peningkatan ide serta usaha menangani masalah dengan fokus ke daerah regional saja (Office, 2020).

Pada tahun 2020 dibuatlah pembaruan mengenai kebijakan ramah terhadap kelahiran anak dan untuk membesarkan anak. Para orang tua akan mendapatkan lingkungan kerja yang sesuai dengannya hingga masa depan setelah melahirkan atau mengurus anak. Penciptaan lingkungan yang mendukung untuk pernikahan baik di lingkungan rumah maupun lingkungan kerja. Pemberian kerja lagi bagi perempuan yang awalnya berhenti bekerja akibat melahirkan dan mengurus anak. Dorongan sekeras kerasnya bagi laki-laki untuk ikut mengurus anak. Selanjutnya

adalah dukungan terhadap kebutuhan keluarga; dukungan pengasuhan anak baik dari finansial, beban fisik dan mental, dukungan bagi keluarga yang memiliki anak banyak, dukungan kepada ibu hamil hingga melahirkan, macam-macam bentuk bantuan layanan penitipan anak, mendukung inisiatif antara daerah yang berbeda mengenai perkawinan dan pengasuhan anak serta kebijakan-kebijakan tahun sebelumnya yang masih berlaku. Hal itu termasuk dukungan keuangan supaya orang tua tidak khawatir tentang hal pembiayaan, pengembangan lingkungan yang suportif bagi ibu dan ayah untuk sama-sama berperan dengan porsi yang sama dalam mengurus anak (Cabinet office, 2021).

Kebijakan lanjutan dari tahun 2021 diberlakukan di tahun 2022, yaitu rencana-rencana di masa depan ketika sudah melahirkan dan mengurus anak. Hal itu dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang sesuai dengan keadaan anak muda yang baru memiliki anak. Untuk kebijakan yang lain masih sama hanya melanjutkan kebijakan yang telah diatur (Office, 2022). Bantuan pembinaan kepada relawan untuk mendukung perkawinan. Relawan tersebut dapat berasal dari pensiunan atau lanjut usia untuk membantu.

Evaluasi Kebijakan Pemerintah Jepang dalam Isu Penurunan Angka Kelahiran

Beberapa kebijakan yang telah dibuat pemerintah Jepang merupakan bentuk keseriusan Jepang dalam upaya menanggulangi penurunan angka kelahiran di negaranya. Namun, diperlukan evaluasi terhadap kebijakan dengan menilai hasil implementasinya dan apakah kebijakan yang telah dibuat berhasil mengatasi permasalahan tersebut. Evaluasi kebijakan pemerintah Jepang dalam mengatasi isu penurunan angka kelahiran dilakukan dengan mengukur hasil implementasi kebijakan yang diterapkan dalam periode 2005-2022. Meskipun kebijakan yang dimulai sejak tahun 2005 belum berhasil mengubah tren penurunan minat melahirkan dari perempuan Jepang, seperti yang terjadi pada tahun 1990-an hingga 2005, kebijakan tersebut belum memberikan dampak yang diharapkan, bahkan mencapai titik terendah pada tahun 2005 dengan angka 38,8 persen.

Pemerintah Jepang juga telah menyiapkan anggaran khusus untuk meningkatkan angka kelahiran melalui tunjangan anak, peningkatan beasiswa, dan perubahan kurikulum sekolah. Namun penurunan angka kelahiran masih berlanjut. Upaya untuk menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga, termasuk tinjauan terhadap gaya kerja, juga belum sepenuhnya berhasil mengubah persepsi masyarakat terkait kelahiran anak. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Jepang belum mampu mengubah persepsi masyarakat Jepang karena belum sesuai dengan nilai dan budaya masyarakat Jepang yang cenderung fokus terhadap karir dan berorientasi individualistik. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang memperhitungkan faktor budaya agar lebih sesuai dengan nilai dan orientasi masyarakat Jepang.

Dari pernyataan Takumi Fujinami, dapat ditinjau sedikit lebih mendalam kembali kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi ini pada dasarnya perlu difokuskan pada pertanyaan terkait, siapa yang tidak aman dan mengapa? Pemerintah Jepang sejauh ini selalu terfokus pada isu ekonomi dengan memberikan bantuan dan tunjangan kelahiran serta kesehatan. Padahal, alangkah baiknya bila kita berfokus

lebih mendalam pada pertanyaan, mengapa masyarakat Jepang merasa tidak aman dan tidak berkeinginan memiliki anak di negaranya sendiri? Pernyataan pemerintah bahwa sikap tidak memiliki anak adalah tindakan egois sebenarnya adalah keegoisan pemerintah sendiri yang tidak mampu memahami permasalahan utama dari isu tersebut.

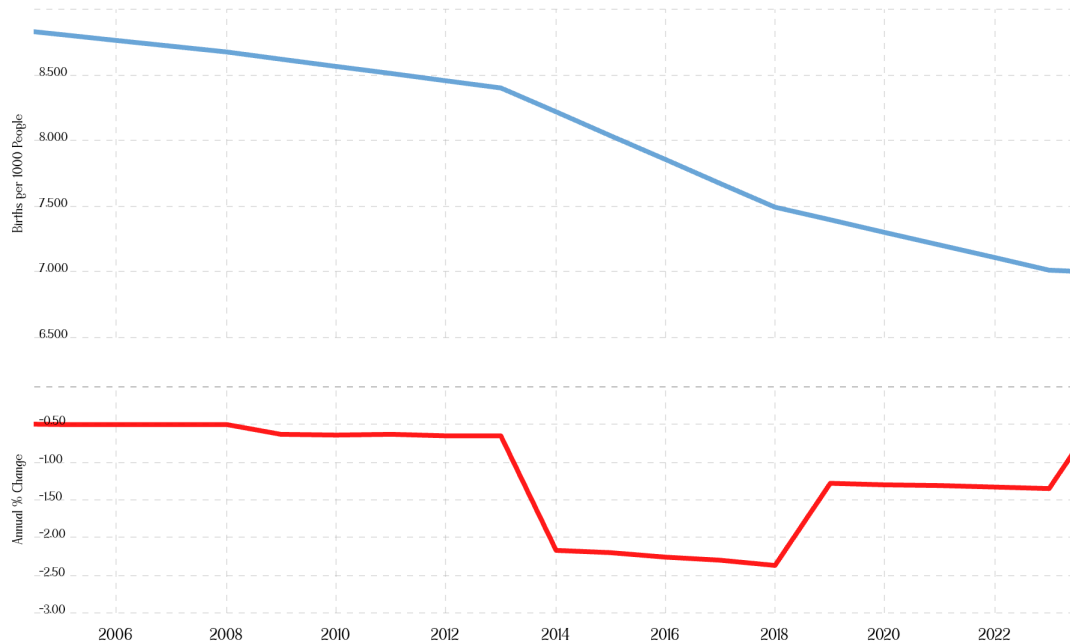
Fakta bahwa perempuan-perempuan Jepang lebih mengejar karir sebenarnya mampu diartikan lebih jauh menjadi rasa ketidak-amanan mereka untuk menghadapi dan menerima tanggung jawab sepenuhnya dalam hal merawat dan membesarkan anak mengingat tuntutan sosial yang sepenuhnya dibebankan kepada ibu sebagai figur yang membesarkan anak dan mengurus rumah. Warga Jepang dan keluarga-keluarga di Jepang lumrahnya tidak memiliki asisten rumah tangga yang dapat membantu mengurus rumah. Sedangkan, laki-laki pada umumnya tidak terlalu terlibat dalam urusan tersebut. Ibu yang memilih untuk bekerja otomatis harus mampu menangani pekerjaannya di kantor sekaligus mengurus rumah dan anak. Pola ini yang kemungkinan menurunkan minat Masyarakat Perempuan untuk menikah dan memiliki anak.

Di sisi lain, populasi laki-laki pun merasa memiliki tanggung jawab yang lebih bila sudah menikah. Tanggung jawab memberi nafkah keluarga sebagai kepala keluarga, ditambah besarnya biaya hidup, serta bukan hanya sulitnya mendapat lapangan pekerjaan, tapi juga tuntutan dunia kerja dengan pola normalisasi bekerja lembur, masih dengan tuntutan sosial untuk menjalin hubungan baik dengan rekan kerja dengan budaya minum atau makan bersama hingga larut malam di kedai maupun restoran yang sering dilakukan apalagi setelah selesai atau mulai mengerjakan proyek bersama, menjadikan masyarakatnya hidup dengan tanggung jawab pekerjaan yang cukup masif. Budaya makan dan minum yang cukup sering dilakukan juga menambah beban pengeluaran keuangan yang tidak mendesak menjadi cukup besar, apalagi bila ditambah dengan tanggung jawab untuk menafkahi keluarga.

Rata-rata masyarakat khususnya pekerja kantoran di Jepang merasa tertuntut untuk loyal dan bekerja keras demi membangun Perusahaan tempat mereka bekerja. Bekerja lembur kemudian seperti ternormalisasikan seolah menjadi kewajiban yang harus dipenuhi. Penulis berpendapat bahwa permasalahan dunia kerja ini, termasuk dengan tuntutan-tuntutan sosial yang ada, terlalu memakan banyak ruang gerak dan perhatian masyarakatnya, sehingga tanggung jawab besar dalam memiliki, membesarkan, dan membiayai anak menjadi momok yang ditakuti oleh masyarakat Jepang.

Di sisi lain, Konsorsium Dukungan Pengasuhan Anak dan program "Sankyū Papa Project" yang diperkenalkan pada tahun 2018 belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan angka kelahiran. Meskipun ada amandemen kebijakan, target angka kelahiran belum tercapai. Upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan pendukung keluarga, seperti fasilitas penitipan anak di tempat kerja dan peningkatan gaji pengasuh anak, belum mampu mengubah pandangan pekerja dan keluarga. Meskipun ada berbagai program pendukung, termasuk bantuan persalinan dan pengembangan sistem perawatan perinatal, isu-isu fundamental terkait pekerjaan, dukungan keluarga, dan beban hidup masih menjadi kendala dalam meningkatkan angka kelahiran.

Angka Kelahiran di Jepang (2005-2022)



United Nations - World Population Prospect

Berdasarkan data dari tahun 2005 hingga 2022, angka kelahiran di Jepang terus mengalami penurunan rata-rata 1,2 persen setiap tahunnya. Pada tahun 2022, data menunjukkan angka kelahiran hanya 7.109 kelahiran per 1000 orang, mengalami penurunan sebesar 1,33 persen dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu, kebijakan yang diterapkan dianggap belum efektif karena tidak mampu mencapai tujuan awalnya, yaitu meningkatkan angka kelahiran. Untuk itu, diperlukan pengembangan lebih lanjut terhadap strategi yang telah diterapkan dan perlu adanya kebijakan baru yang lebih efektif dan menyeluruh dalam merespons permasalahan tersebut.

KESIMPULAN

Isu penurunan angka kelahiran masyarakat Jepang sudah menjadi masalah yang muncul setiap tahun bahkan dimulai sejak berabad-abad tahun lalu. Penurunan angka kelahiran menjadi isu bersama yang dapat dikatakan sebagai isu nasional. Semua orang, pakar, ilmuwan menyadari hal tersebut dan terus berupaya untuk menyuarakan pendapat mereka masing-masing akan keprihatinannya. Akhirnya, isu ini berhasil menjadi perhatian utama oleh pemerintah dan dibentuklah kebijakan-kebijakan untuk menanganinya. Sehingga, dapat dikatakan bahwa isu ini berhasil tersekritisasi. Upaya pemerintah Jepang dalam mengidentifikasi dan merancang kebijakan untuk menaikkan angka melahirkan bagi masyarakatnya sudah sangat lengkap dan cukup konkret serta mengikuti perkembangan jaman. Namun, hasil dari upaya-upaya tersebut masih menghasilkan dampak yang buruk atau bahkan tidak membuat situasi menjadi lebih baik. Kebijakan yang jelas dilakukan pertama kali pada masa pemerintahan Perdana Menteri Shinzo Abe hingga sekarang justru menghasilkan angka kelahiran yang terus menurun.

Penggaalaan kebijakan besar-besaran dilakukan saat Jepang mengalami penurunan angka yang sangat buruk, yaitu pada kisaran tahun 1965, tahun 1990 dan tahun 2005. Tahun-tahun tersebut mencatat rekor yang paling buruk, bahkan angka yang paling rendah tahun 2005 dengan segala kebijakan yang telah dilakukan sangat konkret mencakup seluruh kehidupan masyarakat untuk mendukung menciptakan kehidupan mengasuh dan merawat anak semaksimal mungkin. Namun, kenaikan angka kelahiran masih sangat rendah atau bertumbuh sangat sedikit saja yang terbukti pada tahun 2022 hanya di angka 1,33%.

Saran penulis bagi pemerintah adalah terus mengupayakan tindakannya dengan mengedepankan kampanye atau tindakan-tindakan sosialisasi lebih dalam kepada masyarakat dengan pembahasan yang simpel, mudah dimengerti dan tidak bertele-tele sehingga hanya membuang-buang waktu perseorangan yang mungkin sibuk bekerja. Bagi pemerintah juga bisa memberikan subsidi lebih kepada kantor atau pembuatan fasilitas yang gratis untuk menunjang kebutuhan anak-anak. Supaya orang tua tidak khawatir akan kebutuhan dana yang besar untuk membesarkan anak dengan sebaik mungkin.

Saran bagi penelitian selanjutnya, mungkin bisa mencari data lebih banyak lagi dan kalau memungkinkan bisa melakukan survei secara langsung kepada masyarakat Jepang yang menjadi perhatian utama dalam isu ini. Hal itu dilakukan supaya bisa mendapatkan alasan yang lebih konkret dan jelas mengapa mereka enggan untuk melahirkan bahkan enggan untuk menikah. Karena data utama yang didapat penulis hanya berasal dari laporan yang dibuat oleh Pemerintah Jepang bukan dari masyarakat langsung yang menerima kebijakan.

Penulis lebih jauh lagi merekomendasikan pemerintah Jepang untuk lebih fokus merubah sistem alih-alih mengupayakan solusi dari permasalahan yang ada di atas permukaan. Penurunan masif angka kelahiran berarti mereka merasa tidak aman untuk memiliki anak dengan situasi dan kondisi Jepang saat ini. Kampanye-kampanye yang dilakukan pemerintah Jepang dapat diarahkan untuk menciptakan propaganda baru yang mampu mengikis pola-pola beban dan ketakutan masyarakat terkait tuntutan sosial yang membebankan perempuan untuk sepenuhnya bertanggung jawab mengurus rumah dan tetap mampu mengcover semuanya meskipun memilih bekerja, menghapuskan budaya lembur di kantor untuk para pekerja termasuk pekerja laki-laki yang sudah menikah dan memiliki anak, untuk lebih banyak meluangkan waktu di rumah baik untuk membantu mengurus rumah dan anak maupun untuk melepas lelah dengan keluarga. Sebab, menurut hemat penulis, isu ini tidak semata-mata didasari oleh permasalahan ekonomi, tetapi juga terkait psikologi masyarakat yang perlu dibebaskan dari beratnya tuntutan sosial dan maupun di dunia kerja. Lebih spesifik lagi, pemerintah mungkin bisa melirik upaya kampanye-kampanye bagi masyarakat untuk lebih banyak menghabiskan waktu dengan pasangan dan anak sehingga tidak terlalu suntuk dalam menghadapi permasalahan sosial yang ada, sekaligus meningkatkan minat masyarakat untuk menikah dan mempunyai anak.

DAFTAR PUSTAKA

- AG Subarsono, Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi (Pustaka Pelajar, 2013)
- Caballero-Anthony, M. (2016). On Security. In An introduction to non-traditional security studies: A transnational approach. essay, SAGE.
- Caballero-Anthony, M. (2016). Understanding Non-traditional Security. In An introduction to non-traditional security studies: A transnational approach. essay, SAGE.
- Cabinet Office. (2019). Annual Report on the Declining Birthrate 2019 (Summary) June 2019.
- Cabinet Office. (2019). Annual Report on the Declining Birthrate 2019 (Summary) June 2019.
- Cabinet office. (2021). Annual report on the declining Birthrate 2021 (Summary). Cabinet Office, Government of Japan.
- Cabinet office. (2021). Annual report on the declining Birthrate 2021 (Summary). Cabinet Office, Government of Japan.
- George Wright. (2023). Japan PM says country on the brink over falling birth rate. BBC News. <https://www.bbc.com/news/world-asia-64373950>
- George Wright. (2023). Japan PM says country on the brink over falling birth rate. BBC News. <https://www.bbc.com/news/world-asia-64373950>
- HISANAGA, R. (2023). Of single women , only 36 % want to have children after marriage. The Asahi Shimbun. <https://www.asahi.com/ajw/articles/14717718>
- HISANAGA, R. (2023). Of single women , only 36 % want to have children after marriage. The Asahi Shimbun. <https://www.asahi.com/ajw/articles/14717718>
- Littlejohn, B. (2023). A childless future in Japan?:Low fertility is a crisis, but government funding won't solve a problem of misplaced priorities. WORLD. <https://wng.org/opinions/a-childless-future-in-japan-1675254268>
- Littlejohn, B. (2023). A childless future in Japan?:Low fertility is a crisis, but government funding won't solve a problem of misplaced priorities. WORLD. <https://wng.org/opinions/a-childless-future-in-japan-1675254268>
- Marriage and Mat (Vol. 2007, Issue December). https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/whitepaper/measures/english/w-2008/pdf/p5_13.pdf
- Mccurry, J., & Nikai, T. (2018). Childless couples are “selfish” says Japanese political chief. <https://www.theguardian.com/world/2018/jun/27/childless-couples-are-selfish-says-japanese-political-chief>
- Menju, T. (2017). Imigrasi solusi masalah kependudukan di Jepang. Eastasiaforum. <https://eastasiaforum.org/2017/10/26/immigration-the-solution-to-japans-population-problem/>
- Muchlis Hamdi, Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi (Ghalia Indonesia, 2013)
- Nippon.com. (2022). Japan Continues to Gray: Baby. Nippon.Com. <https://www.nippon.com/en/japan-data/h01446/>
- Office, C., & Plan, N. A. (2014). Chapter 2 Efforts to Deal with the Declining Birthrate.

- Office, C. (2008a). Chapter 2: Countermeasures against a Declining Birthrate Past countermeasures 1. From ' 1. 57 Shock ' to ' New Countermeasures Against Declining Birthrate ' 2. Analyses of the Difference between Citizens ' Desires and the Realities of Marriage and Mat (Vol. 2007, Issue December).
- Office, C. (2008b). Part 1: Current Countermeasures against Declining Birthrate, and Tasks Chapter 1. Current Status of Low Birthrate (Vol. 000).
- Office, C. (2010). Chapter 1 Formulation of _ Vision on Children and Childcare ' 1. Aiming at the Society for Supporting Children and Childcare 2. Reviewing Current Policies (Issue March).
- Office, C. (2011a). Chapter 2. Society which can realize hopes of pregnancy, birth and childcare.
- Office, C. (2011b). Part 2. Basic Implementation Status for Children and Child Care Measures in 2010 Chapter 1 Supporting growth of children and realizing the society that the youth can grow at ease.
- Office, C. (2012). Chapter 3 Strengthening community with multiple networks which performs childcare.
- Office, C. (2013a). Current Status of Measures to Cope with Declining Birth Rate and its Challenges Chapter 1 Current Status of Declining Birth Rate.
- Office, C. (2013b). Specific Implementation Status of Measures against Declining Birthrate Chapter 1 In Pursuit of a Society Where Parenting is supported and Young People can grow in Confidence.
- Office, C. (2016a). 4. Situations of childbirth and childrearing (Thoughts about childbirth) (Difficulty persists in continuing employment for women).
- Office, C. (2016b). Chapter 2 Efforts to Deal with the Declining Birthrate.
- Office, C. (2017). Current Status of Countermeasures against Declining Birthrate (Summary).
- Office, C. (2020). Annual Report on the Declining Birthrate 2020 (Summary). Cabinet Office, Government of Japan.
- Office, C. (2022). Annual Report on the Declining Birthrate 2022 (Summary).
- Research, N. I. of P. and S. (2023). Population Statistics of Japan 2023. <https://www.ipss.go.jp/p-info/e/psj2023/PSJ2023.asp>
- Riant Nugroho, Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan. (PT Elex Media Komputindo, 2017).
- Thejapantimes. (2023). Half of unmarried people under 30 in Japan don't want kids, survey finds. The Japan Times, Ltd. <https://www.japantimes.co.jp/news/2023/04/08/national/social-issues/children-parenthood-surveys/>
- WorldData.info. (2023). The average age in global comparison. WorldData.Info. <https://www.worlddata.info/average-age.php>